

**HUBUNGAN ANTARA STATUS AKREDITASI DENGAN KEPATUHAN BIDAN
TERHADAP SOP PERTOLONGAN PERSALINAN DI UPTD PUSKESMAS MAMPU
PONED KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022**

***Relationship Between Accreditation Status and Midwife Compliance with Delivery Assistance
SOP in Mampu Poned Puskesmas Karawang District in 2022***

Sri Sumiyati, Mariyati

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara

Abstrak

Pendahuluan: Tujuan utama akreditasi Puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Pendekatan yang dipakai dalam akreditasi Puskesmas adalah keselamatan dan hak pasien dan keluarga, dengan tetap memperhatikan hak petugas. Prinsip ini ditegakkan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan. Dari 28 Puskesmas yang mampu PONED yang ada di Kabupaten Karawang terdapat 224 Bidan dari jumlah tersebut sebanyak $\pm 5\%$ berpendidikan D4 Kebidanan dan 95% berpendidikan D3 Kebidanan, dari hasil pengamatan penulis yang dilakukan di 3 Puskesmas Poned, ditemukan adanya ketidakpatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan dalam memberikan pelayanan terutama dalam hal penggunaan Alat pelindung Diri (APD) (Sari, 2017). **Metode Penelitian:** Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analitik dengan pendekatan *Cross Sectional*, yaitu variabel dependen dan data untuk variabel independen dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. Setelah data terkumpul, akan dilihat gambaran distribusi frekuensi dari variabel dependen dan variabel independen, dilanjutkan dengan hubungan dari kedua variabel tersebut. **Hasil:** Hasil analisis hubungan status akreditasi dengan kepatuhan bidan terhadap SOP Pertolongan persalinan terlihat nilai *Asymp.sign* sebesar 0,715, karena *p-value* $0,715 > 0,05$ maka dapat di simpulkan bahwa tidak terdapat hubungan status akreditasi dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan. **Kesimpulan:** Tidak terdapat hubungan antara status akreditasi, lama kerja, tingkat pendidikan dan lama kerja dengan kepatuhan bidan terhadap SOP Pertolongan Persalinan Di Puskesmas Mampu Poned Wilayah Kabupaten Karawang. Terdapat hubungan pengetahuan dengan kepatuhan bidan terhadap SOP Pertolongan Persalinan Di Puskesmas Mampu Poned Wilayah Kabupaten Karawang.

Abstract

Introduction: The main objective of Puskesmas accreditation is to foster quality improvement, performance through continuous improvement of the management system, quality management system and service delivery system and programs, as well as the application of risk management, and not just an assessment to obtain an accreditation certificate. The approach used in Puskesmas accreditation is the safety and rights of patients and families, while still paying attention to the rights of officers. Of the 28 Puskesmas that are capable of PONED in Karawang Regency, there are 224 midwives, of which $\pm 5\%$ have D4 Midwifery education and 95% have D3 Midwifery education. in providing services, especially in terms of using Personal Protective Equipment (PPE) (Sari, 2017). **Method:** The research design used in this study is to use an analytic method with a cross sectional approach, namely the dependent variable and data for the independent variables are collected at the same time. After the data is collected, an overview of the frequency distribution of the dependent and independent variables will be seen, followed by the relationship between the two variables. **Result:** The results of the analysis of the relationship between accreditation status and midwives' compliance with SOPs for delivery assistance show an *Asymp.sign* value of 0.715, because the *p-value* is

Riwayat artikel

Diajukan: 4 Juni 2023

Diterima: 19 Juli 2023

Penulis Korespondensi:

- Sri Sumiyati
- Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara

e-mail:

sumiyatirasidi92@gmail.com

Kata Kunci:

Accredity Status, Midwife Compliance, Delivery Assistance SOP, PONED, Puskesmas

*0.715 > 0.05, it can be concluded that there is no relationship between accreditation status and midwives' compliance with SOPs for delivery assistance. **Conclusion:** There is no relationship between accreditation status, length of work, education level and length of work with midwives' compliance with SOP for Assistance in Childbirth at the Capable Poned Community Health Center in Karawang Regency. There is a relationship between knowledge and midwives' compliance with SOP for Assisted Childbirth at the Capable Poned Community Health Center in Karawang Regency*

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional, tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Puskesmas merupakan garda depan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. Puskesmas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat. Kecamatan sehat adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Dinas Kesehatan Kab. Karawang, 2018). Agar Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal perlu dikelola dengan baik, baik kinerja pelayanan, proses pelayanan, maupun sumber daya yang digunakan. Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, serta dapat menjawab kebutuhan mereka, oleh karena itu upaya peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien perlu diterapkan dalam pengelolaan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan swasta.

Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskesmas, maka perlu dilakukan penilaian

oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Puskesmas wajib untuk diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali, demikian juga akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS. Tujuan utama akreditasi Puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Pendekatan yang dipakai dalam akreditasi Puskesmas adalah keselamatan dan hak pasien dan keluarga, dengan tetap memperhatikan hak petugas. Prinsip ini ditegakkan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan. Kabupaten Karawang mempunyai 50 Puskesmas yang semuanya telah terakreditasi. Diantara 50 Puskesmas ada 28 Puskesmas yang mampu PONE dengan hasil Akreditasi Dasar 9 Puskesmas, Madya 12 Puskesmas, Utama 7 Puskesmas dan belum ada yang mendapatkan hasil Paripurna. Beberapa Puskesmas seharusnya dilakukan reakreditasi pada tahun 2021 tetapi karena situasi pandemi maka proses penilaian akreditasi diundur sampai dengan status pandemi berakhir dan digantikan oleh surat pernyataan dari Kepala Puskesmas yaitu surat pernyataan bersedia menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. (Dinas Kesehatan Kab. Karawang, 2018). Dari 28 Puskesmas yang mampu PONE yang ada di Kabupaten Karawang terdapat 224 Bidan dari jumlah tersebut sebanyak $\pm 5\%$ berpendidikan D4 Kebidanan dan 95% berpendidikan D3 Kebidanan, dari hasil pengamatan penulis yang dilakukan di 3 Puskesmas Poned, ditemukan adanya ketidakpatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan dalam memberikan pelayanan terutama dalam hal penggunaan Alat pelindung Diri (APD) (Sari, 2017). Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk menilai kepatuhan bidan terhadap Standar Operasional Pelayanan (SOP) dalam menolong persalinan di Puskesmas Poned yang ada di Kabupaten Karawang (Juliana, 2017).

KAJIAN PUSTAKA

1. Akreditasi Puskesmas

Akreditasi Puskesmas menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 8 adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan. Mengacu pada Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 Pasal 6 Ayat 2 bahwa puskesmas harus terakreditasi jika bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seiring dengan perintah pada Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 Pasal 3 Ayat 1.

Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 Pasal 2 menyebutkan manfaat dari akreditasi puskesmas adalah:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
- b. Meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya, serta Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi sebagai institusi; dan
- c. Meningkatkan kinerja Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau kesehatan masyarakat.

2. Kepatuhan

Kepatuhan didefinisikan sebagai perubahan sikap dan tingkah laku untuk mengikuti permintaan maupun perintah orang (Ari Susanti, Ani Laila, 2015). Menurut Arikunto (2010), kepatuhan petugas profesional adalah perilaku seseorang yang profesional terhadap suatu anjuran, prosedur, atau peraturan yang harus dilakukan atau ditaati. Perilaku kepatuhan bersifat sementara karena perilaku tersebut akan bertahan apabila ada pengawasan. Jika pengawasan hilang maupun mengendur maka akan timbul perilaku ketidakpatuhan. Perilaku kepatuhan ini akan optimal apabila perawat itu sendiri menganggap perilaku ini bernilai positif yang akan diintegrasikan melalui tindakan asuhan keperawatan (Ari Susanti, Ani Laila, 2015). Kepatuhan merupakan ketaatan atau ketidaktaatan pada perintah, aturan dan disiplin. Perubahan sikap dan perilaku individu di mulai dari tahap kepatuhan, identifikasi, kemudian

internalisasi. Kepatuhan dimulai dari individu yang mematuhi anjuran tanpa kerelaan karena takut hukuman atau sanksi. Tahap identifikasi adalah kepatuhan karena merasa diawasi. Jadi pengukuran kepatuhan melalui identifikasi adalah sementara dan kembali tidak patuh lagi bila sudah merasa tidak diawasi lagi. Tahap internalisasi adalah tahap individu melakukan sesuatu karena memahami makna, mengetahui pentingnya tindakan secara rasional. Jadi kepatuhan dapat diukur dari individu yang mematuhi atau mentaati karena telah memahami makna suatu ketentuan yang berlaku. Perubahan sikap dan individu dimulai dari patuh terhadap aturan atau institusi, seringkali memperoleh imbalan atau janji jika menurut anjuran atau pedoman. Dari berbagai studi terbukti bahwa *compliance* menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat sementara, dan individu cenderung kembali ke pandangan atau perilakunya yang semula jika pengawasan kelompok mengendur atau jika dia pindah dari kelompoknya (Azwar Saifuddin, 2015).

Menurut Suciati (2015) terdapat enam prinsip dasar dalam hal kepatuhan. Hal-hal yakni komitmen, hubungan sosial, kelangkaan, resiprositas, validasi sosial, dan otoritas. Dalam prinsip komitmen atau konsistensi, ketika kita telah meningkatkan diri pada suatu posisi atau tindakan, kita akan lebih mudah memenuhi permintaan akan suatu hal yang konsisten dengan posisi atau tindakan sebelumnya. Dalam prinsip hubungan sosial atau rasa suka, kita cenderung lebih mudah memenuhi permintaan teman atau orang yang kita sukai daripada permintaan teman atau orang yang tidak kita kenal, atau kita benci. Dalam prinsip kelangkaan, kita lebih menghargai dan mencoba mengamankan objek yang langka atau berkurang ketersediaannya. Oleh karena itu, kita cenderung memenuhi permintaan yang menekankan kelangkaan daripada yang tidak. Dalam prinsip timbal balik, kita lebih mudah memenuhi permintaan dari seorang yang sebelumnya telah memberikan bantuan kepada kita. Dalam prinsip validasi sosial, kita lebih mudah memenuhi permintaan untuk melakukan suatu tindakan jika konsisten dengan apa yang kita percaya bahwa orang lain akan melakukannya juga. Kita ingin bertingkah laku benar, dan satu cara untuk memenuhinya adalah dengan bertingkah laku dan berpikir seperti orang lain. Dalam prinsip otoritas, kita lebih

mudah memenuhi permintaan orang lain yang memiliki otoritas yang diakui, atau setidaknya tampak memiliki otoritas. Berdasarkan penelitian yang dilakukann oleh Milgram (1963) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan yaitu :

- a. Status lokasi, dimana semakin penting lokasi tempat diberikan instrument maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa prestise meningkatkan kepatuhan.
- b. Tanggung jawab personal, dimana semakin besarnya tanggung jawab personal maka tingkat kepatuhan akan meningkat.
- c. Legitimasi dari figur otoritas. Legitimasi dalam hal ini dapat diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan, atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Menurut milgram, sekelompok orang cenderung untuk memenuhi perintah dari orang lain jika mereka mengenal otoritas mereka dengan baik secara moral maupun hukum yang berlaku dalam berbagai situasi.
- d. Status dari figur otoritas. Pada saat melakukan penelitian, Milgram mengenakan mantel laboratorium yang dapat memberikan status tinggi dan berakibat pada peningkatan kepatuhan dari subyek yang diteliti, namun Ketika ia menggunakan pakaian sehari-hari kepatuhan menjadi berkurang. Sehingga ia menyimpulkan bahwa status dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan.
- e. Dukungan rekan, dimana jika seseorang memiliki dukungan sosial dari teman mereka untuk tidak patuh, maka ketaatan mungkin akan berkurang. Juga kehadiran orang lain yang terlihat tidak mematuhi figur otoritas mengurangi tingkat ketaatan.
- f. Kedekatan dengan figur otoritas, dimana semakin dekat jarak instruksi dari sosok otoritas maka tingkat kepatuhan semakin tinggi.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Melaksanakan Standar Operasional Pertolongan Persalinan

a. Faktor Internal

1) Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, yang terjadi karena proses penginderaan yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu (Soekidjo Notoatmodjo, 2018).

2) Sikap

Sikap Menurut (Azwar Saifuddin, 2015) sikap merupakan suatu bentuk evaluasi atau reaksi dari perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek merupakan manifestasi dan dapat mendeskripsikan perasaan seseorang terhadap objek tersebut. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap antara lain pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama maupun pengaruh faktor emosional.

3) Kemampuan

Kemampuan merupakan bakat seseorang untuk melakukan tugas fisik maupun mental. Kemampuan seseorang pada umumnya bersifat stabil kemampuan individu berpengaruh terhadap karakteristik pekerjaan, perilaku, tanggung jawab, pendidikan dan memiliki hubungan erat dengan kinerja pekejaan (Azwar Saifuddin, 2015).

4) Motivasi

Motivasi merupakan karakteristik psikologis manusia yang memberi kontribusi pada tingkat komitmen seseorang. Hal ini termasuk kedalam faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menyebabkan, menyalurkan, dan mempertahankan tingkah laku manusia dalam arah tekad tertentu. Dengan demikian motivasi mempunyai 3 aspek, yaitu keadaan terdorong dalam diri organisme yaitu kesiapan bergerak karena kebutuhan, perilaku timbul dan terarah karena keadaan ini, goal atau tujuan yang dituju oleh perilaku tersebut (Nursalam, 2016).

b. Faktor Eksternal

1) Karakteristik Organisasi

Keadaan dari organisasi dan struktur organisasi ditentukan oleh filosofi dari manajer organisasi tersebut. Keadaan organisasi dan struktur organisasi dapat memotivasi perawat untuk berpartisipasi pada tingkatan yang konsisten sesuai dengan tujuan. Ivancevich (2013), berpendapat bahwa karakteristik organisasi meliputi komitmen organisasi dan hubungan kerja antara pekerja dengan supervisor yang akan mempengaruhi kepuasan terhadap individu.

2) Karakteristik kelompok

Kelompok merupakan unit komunitas yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki suatu kesatuan tujuan dan pemikiran serta integritas antar anggota yang tinggi (Ivancevich, 2013). Karakteristik kelompok adalah: adanya interaksi, adanya struktur, kebersamaan, adanya tujuan, ada suasana kelompok, dan adanya dinamika interdependensi. Anggota kelompok melakukan peran tugas, peran pembentukan, pemeliharaan kelompok, dan peran individu. Anggota melaksanakan hal-hal ini melalui hubungan interpersonal. Tekanan dari kelompok sangat berpengaruh terhadap hubungan interpersonal dan tingkat kepatuhan individu karena individu terpaksa mangalah dan mengikuti perilaku mayoritas kelompok meskipun sebenarnya individu tersebut tidak menyetujuinya (Ivancevich, 2013).

3) Karakteristik pekerjaan

Menurut Carpenito (2013), karakteristik pekerjaan akan memberikan motivasi bagi karyawan untuk bekerja lebih giat dan menumbuhkan semangat kerja yang lebih produktif karena karakteristik pekerjaan merupakan proses membuat akan lebih berarti, menarik dan menantang sehingga dapat mencegah seseorang dari kebosanan. Karakteristik pekerjaan memiliki sifat yang berbeda antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lainnya yang bersifat khusus dan merupakan inti pekerjaan yang berisikan sifatsifat tugas yang ada didalamnya.

4) Karakteristik lingkungan

Bidan harus mampu bekerja dalam lingkungan yang terbatas dan berinteraksi secara langsung dengan staf lain, pengunjung, dan tenaga kesehatan lain. Kondisi ini yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan motivasi terhadap pekerjaannya, menyebabkan stress, dan kepenatan (Nurul Jannah, 2016).

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analitik dengan pendekatan *Cross Sectional*, yaitu variabel dependen dan data untuk variabel independen dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. Setelah data terkumpul, akan dilihat gambaran distribusi frekuensi dari variabel dependen dan variabel independen, dilanjutkan dengan hubungan dari kedua variabel tersebut

HASIL PENELITIAN

Distribusi Frekuensi Kepatuhan Bidan, Status Akreditasi Dan Karakteristi Responden di UPTD Puskesmas Mampu Poned Kabupaten Karawang (N=100)

Karakteristik Responden	F	%
Kepatuhan Bidan Terhadap SOP Pertolongan Persalinan	84	84%
Patuh	16	16%
Tidak Patuh		

Status Akreditasi

Paripurna	1	1%
Utama	15	15%
Madya	63	63%
Dasar	21	21%
Tingkat Pendidikan Bidan		
Pendidikan Tinggi	30	30%
Pendidikan Rendah	70	70%

Lama Kerja

> 5 tahun	90	90%
-----------	----	-----

< 5 tahun	10	10%
-----------	----	-----

Riwayat Pelatihan APN

Pernah	59	59%
--------	----	-----

Tidak Pernah	41	41 %
--------------	----	------

Pengetahuan

Baik	40	40 %
------	----	------

Cukup	34	34 %
-------	----	------

Kurang	26	26%
--------	----	-----

Berdasarkan data pada Tabel 1 dilihat dari distribusi kepatuhan bidan, status akreditasi dan karakteristik responden diatas yaitu mayoritas kepatuhan bidan terhadap SOP Pertolongan persalinan adalah bidan patuh berjumlah 84 orang (84%), Status akreditasi puskesmas Mampu PONEK Kabupaten Karawang adalah akreditasi madya berjumlah 63 orang (63%), Tingkat pendidikan bidan adalah pendidikan rendah (D3) berjumlah 70 orang (70%), Lama kerja > 5 tahun berjumlah 90 orang (90%), Riwayat pelatihan APN adalah pernah mengikuti pelatihan APN berjumlah 59 orang (59%), pengetahuan bidan adalah baik berjumlah 40 orang (40%).

Hubungan status akreditasi dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan
Tabel 2

Hubungan status akreditasi dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan di puskesmas Mampu PONEK Kabupaten Karawang

Status Akreditasi	Kepatuhan Bidan						Asymp.sign (2 – sided)
	Patuh		Tidak Patuh		Total		
	f	%	f	%	f	%	
Paripurna	1	1%	0	0%	1	1%	0,715
Utama	13	13%	2	2%	15	15 %	
Madya	51	51%	12	12%	63	63 %	
Dasar	19	19%	2	2%	21	21 %	
Total	84	84%	16	16 %	100	100 %	

Hasil analisis hubungan status akreditasi dengan kepatuhan bidan terhadap SOP Pertolongan persalinan terlihat nilai *Asymp.sign* sebesar 0,715, karena *p-value* 0,715 > 0.05

maka dapat di simpulkan bahwa tidak terdapat hubungan status akreditasi dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan.

Hubungan tingkat pendidikan dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan

Hubungan tingkat pendidikan dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan di puskesmas Mampu PONEK Kabupaten Karawang

Kepatuhan Bidan							Asymp.sign (2 – sided)
Pendidikan	Patuh		Tidak Patuh		Total		
	f	%	f	%	f	%	
Pendidikan Tinggi	27	27 %	3	3 %	30	30 %	0,284
Pendidikan Rendah	57	57 %	13	13 %	70	70%	
Total	84	84 %	16	16 %	100	100%	

Hasil analisis hubungan tingkat pendidikan dengan kepatuhan bidan terhadap SOP Pertolongan persalinan terlihat nilai *Asymp.sign* sebesar 0,284, karena *p-value* 0,284 > 0.05

maka dapat di simpulkan bahwa tidak terdapat hubungan tingkat pendidikan dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan.

Hubungan lama kerja dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan

Hubungan lama kerja dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan di puskesmas Mampu PONEK Kabupaten Karawang

Lama Kerja	Kepatuhan Bidan						Asymp.sign (2 – sided)
	Patuh		Tidak Patuh		Total		
	f	%	f	%	f	%	
> 5 Tahun	76	76%	14	14 %	90	38,5 %	0,716
< 5 Tahun	8	8%	2	2 %	10	61,5 %	
Total	84	84 %	16	16%	100	100%	

Hasil analisis hubungan lama kerja dengan kepatuhan bidan terhadap SOP Pertolongan persalinan terlihat nilai *Asymp.sign* sebesar 0,716, karena *p-value* 0,716 > 0.05 maka dapat

di simpulkan bahwa tidak terdapat hubungan lama kerja dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan.

Hubungan riwayat pelatihan APN dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan

Hubungan riwayat pelatihan APN dengan kepatuhan bidan terhadap SOP Pertolongan persalinan di puskesmas Mampu PONEK Kabupaten Karawang

Riwayat Pelatihan APN	Kepatuhan Bidan						Asymp.sign (2 – sided)
	Patuh		Tidak Patuh		Total		
	f	%	f	%	f	%	
Pernah	52	52%	7	7 %	59	28,8 %	0,176
Tidak Pernah	32	32 %	9	9 %	41	71,2 %	
Total	84	84 %	16	16%	100	100%	

Hasil analisis hubungan pelatihan APN dengan kepatuhan bidan terhadap SOP Pertolongan persalinan terlihat nilai *Asymp.sign* sebesar 0,176, karena *p-value* 0,176 > 0.05 maka dapat

di simpulkan bahwa tidak terdapat hubungan riwayat pelatihan APN dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan.

Hubungan pengetahuan dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan

Hubungan pengetahuan dengan kepatuhan bidan terhadap SOP Pertolongan persalinan di puskesmas Mampu PONEK Kabupaten Karawang

Mamapa FORD Kabupaten Karawang				
Pengetahuan	Kepatuhan Bidan			Asymp.sign (2 – sided)
			Total	
	Patuh	Tidak Patuh		

	f	%	f	%	f	%	
Baik	38	36%	2	2%	40	40%	
Cukup	34	34%	0	0%	34	34%	0,000
Kurang	12	12%	14	14%	26	26%	
Total	84	84%	16	16%	100	100%	

Hasil analisis hubungan pengetahuan dengan kepatuhan bidan terhadap SOP Pertolongan persalinan terlihat nilai *Asymp.sign* sebesar 0,000, karena $p\text{-value } 0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan pengetahuan dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan.

PEMBAHASAN

1. Hubungan Status Akreditasi Dengan Kepatuhan Bidan Terhadap SOP Pertolongan Persalinan

Dilihat karakteristik status akreditasi puskesmas mampu PONED Kabupaten Karawang mayoritas akreditasi madya berjumlah 63 orang (63%) dan tidak terdapat hubungan status akreditasi dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan.

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian Risanty, dkk. (2020) yang menyatakan Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 47,1% responden memiliki kepatuhan yang tidak baik. Berdasarkan uji analisis statistik dengan menggunakan Chi-Square menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara status akreditasi dengan kepatuhan pegawai dalam pelaksanaan standar keselamatan pasien ($p=0,257$).

Penyelenggara akreditasi puskesmas terbagi dalam lima jenis akreditasi puskesmas berdasarkan Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 Pasal 9 Ayat 1 yaitu Tidak terakreditasi, Terakreditasi dasar, Terakreditasi madya, Terakreditasi utama, Terakreditasi paripurna. Lampiran Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 menyatakan berbagai panduan resmi untuk mencapai akreditasi puskesmas. Akreditasi puskesmas terdiri dari tiga bagian besar. Ketiga bagian dalam akreditasi puskesmas adalah sebagai berikut: a. Standar Administrasi dan Manajemen; b. Standar Program Puskesmas; c. Standar Pelayanan Medis.

Proses akreditasi puskesmas menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan memiliki sepuluh langkah pokok yang harus dilalui oleh puskesmas. Proses diawali dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempersiapkan tim pendamping akreditasi. Dinas Kesehatan kemudian menetapkan puskesmas yang akan didampingi. Selanjutnya Dinas Kesehatan melakukan lokarya kepada puskesmas yang ditunjuk sebagai penggalangan komitmen puskesmas dalam melaksanakan akreditasi. Tim pendamping kemudian memberikan konsolidasi

berupa pemahaman tentang instrumen akreditasi kepada puskesmas. Puskesmas kemudian mempersiapkan seluruh dokumen internal dan eksternal sesuai yang dibutuhkan. Selanjutnya Dinas Kesehatan melakukan pendampingan self assessment dan kemudian setelah siap dilakukan self assessment.

Penilaian hasil self assessment merupakan jadi panduan kekurangan puskesmas dalam mencapai akreditasi. Langkah selanjutnya adalah puskesmas mempersiapkan dokumen persyaratan beserta memperbaiki sistem sembari mendapatkan pendampingan dari Dinas Kesehatan dalam selang waktu yang ditetapkan. Kemudian setelah persiapan akreditasi selesai maka dilakukan penilaian pra-sertifikasi yaitu dengan menilai puskesmas yang dilakukan Dinas Kesehatan. Setelah dirasa hasil nilai telah mencukupi sasaran maka Dinas Kesehatan langsung mengajukan penilaian akreditasi puskesmas kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (Petra, U. K, 2011).

Menurut asumsi peneliti dengan tidak adanya hubungan status akreditasi dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan karena kepatuhan seseorang di nilai sesuai dengan kesadaran sendiri, motivasi dari atasan serta fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan pertolongan persalinan sesuai SOP serta aturan yang sudah menjadi kewajiban pada manajemen pelayanan kesbidanan pada puskesmas tersebut. Hal ini sesuai menurut teori Lawrence Green yang dikutip dalam Notoatmodjo, (2018), yang mendasari timbulnya perilaku dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor, yakni: a. Faktor- faktor predisposisi (*predisposing factors*), yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan sebagainya. b. Faktor- faktor pemungkin (*enabling factors*), yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas atau sarana kesehatan. c. Faktor- faktor pendorong atau penguat (*reinforcing factors*) yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain, yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat.

2. Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Kepatuhan Bidan Terhadap SOP Pertolongan Persalinan

Dilihat karakteristik tingkat pendidikan bidan adalah pendidikan rendah (D3) berjumlah 70 orang (70%). dan tidak terdapat hubungan tingkat pendidikan bidan dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian Retnaningsih, E., & Nuryanto, N. (2012) yang menyatakan tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan tenaga kesehatan dalam menjalankan SOP menurut pendidikan bidan baik pendidikan D3 kebidanan maupun pendidikan D4/S1 kebidanan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan teori Soekidjo Notoatmodjo, 2018 yang menyatakan pendidikan merupakan bimbingan yang diberikan oleh orang lain agar perkembangan kehidupan seseorang menuju kearah cita cita tertentu. Tingkat pendidikan dapat meningkatkan kepatuhan, sepanjang bahwa pendidikan tersebut merupakan pendidikan yang aktif yang diperoleh secara mandiri, lewat tahapan-tahapan tertentu. Menurut asumsi peneliti terdapatnya tidak ada hubungan antara pendidikan dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan karena adanya faktor lingkungan dengan adanya dukungan sosial dari sesama teman dalam mendukung dalam mengikuti SOP pertolongan persalinan. Hal ini di buktikan menurut teori Carpenito, 2013 yang menyatakan dukungan sosial dalam bentuk dukungan emosional dari anggota keluarga atau teman merupakan faktor penting dalam kepatuhan.

3. Hubungan Lama Kerja Dengan Kepatuhan Bidan Terhadap SOP Pertolongan Persalinan

Dilihat karakteristik responden berdasarkan lama kerja mayoritas > 5 tahun berjumlah 90 orang (90%) dan tidak terdapatnya hubungan lama kerja dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan. Penelitian ini senada dengan penelitian sebelumnya oleh tentang menilai kepatuhan tenaga kesehatan menurut Selano, et al (2019) dengan hasil penelitian dalam menilai kepatuhan perawat berdasarkan lama kerja menggunakan uji fisher di dapatkan $P > 0,05$ yaitu 0,586 hasil tidak ada hubungan lama kerja dengan kepatuhan pada perawat dalam pengisian surgical safety checklist.

Penelitian ini berbeda dengan teori menurut Notoatmodjo, 2018 yang menyatakan lama kerja adalah lamanya seseorang bekerja atau mempunyai pengalaman di bidang

pekerjaannya. Lama bekerja akan berpengaruh terhadap perilaku pekerja. Seseorang yang sudah lama bekerja mempunyai wawasan yang lebih luas dan pengalaman yang lebih banyak sehingga memegang peranan dalam pembentukan perilaku pekerja.

Menurut asumsi peneliti tidak adanya hubungan lama kerja dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan karena apabila seseorang yang sudah lama masa kerjanya dan menganggap dirinya sudah mempunyai pengalaman yang banyak sehingga dalam pertolongan persalinan sudah hal yang biasa dilakukan dengan demikian perilaku seseorang dalam mengikuti SOP pertolongan persalinan sudah tidak di lakukan di karenakan bidan yang lama masa kerja akan mengikuti cara sesuai dengan pengalaman dan tindakan sesuai dengan langkah – langkah menurutnya yang aman.

Pendapat peneliti tersebut sesuai dengan penelitian Sepriningsih & Novita Kurnia Sari (2017) yang menyatakan bahwa seseorang yang masih terdapat tidak berperilaku aman saat penggunaan alat pelindung diri karena merasa sudah berpengalaman dan masa kerja yang sudah lama sehingga pelaksanaan tidak dilakukan sesuai SOP akan tetapi tindakan dilakukan sesuai dengan pemikiran sendiri berdasarkan pengalaman seseorang.

Menurut Peneliti kepatuhan dalam tindakan sesuai SOP pertolongan persalinan dengan adanya penetapan standar kerja sesuai dengan teori menurut Rudi, 2008 dalam penelitian Ulinuha, Z (2021) mengatakan bahwa, “Standar operasional prosedur adalah pedoman yang berisi prosedur - prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas yang dilakukan oleh karyawan didalam organisasi harus berjalan efektif dan efisien. Menurut Arikunto (2018), kepatuhan petugas professional adalah perilaku seseorang yang professional terhadap suatu anjuran, prosedur, atau peraturan yang harus dilakukan atau ditaati. Dengan demikian perlu adanya reward bagi karyawan yang memiliki jiwa professional sehingga karyawan yang lama kerja dapat memberi contoh terhadap karyawan baru dalam tindakan sangat penting SOP agar tindakan dilakukan lebih professional.

Pernyataan ini di dukung oleh penelitian Ulinuha, Z (2021), yang menyatakan professionalitas dapat tumbuh dalam diri

seseorang, apabila manusia tersebut mampu melatih secara terus menerus dan memiliki komitmen terhadap pekerjaan yang digelutinya. Sehingga tenaga kerja tersebut menikmati pekerjaannya dan tidak ada unsur keterpaksaan. Adapun hasil penelitian ini di harapkan oleh peneliti agar bidan puskesmas yang bekerja dengan waktu bekerja yang sudah lama perlu adanya reward bagi karyawan yang profesional dan bekerja sesuai dengan SOP yang sudah di tetapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Astuti, et al (2018) yang menyatakan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa reward berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja karyawan sedangkan punishment berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan.

4. Hubungan Riwayat Pelatihan APN Dengan Kepatuhan Bidan Terhadap SOP Pertolongan Persalinan

Dilihat karakteristik responden berdasarkan riwayat pelatihan APN mayoritas bidan pernah mengikuti pelatihan APN berjumlah 59 orang (59 %) dan tidak terdapat hubungan riwayat pelatihan APN dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Retnaningsih, E., & Nuryanto, N. (2012) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan tenaga kesehatan dalam menjalankan SOP antara kelompok yang sudah dengan yang belum mengikuti pelatihan APN dengan nilai statistik $0,102 > 0,05$. Menurut asumsi peneliti tidak adanya hubungan antara yang mendapat pelatihan APN dan belum pelatihan APN karena kepatuhan di dasari dengan kemauan diri sendiri untuk menjalankan SOP dalam pertolongan persalinan.

Namun pada penelitian mayoritas bidan patuh dalam melakukan tindakan sesuai SOP pertolongan persalinan dan mayoritas sudah mengikuti pelatihan, di nyatakan tidak ada hubungan dikarenakan adanya sesama teman yang tidak menggunakan SOP pertolongan persalinan sehingga bidan lain pun secara otomatis mengikuti hal tersebut. Menurut asumsi peneliti hal tersebut di dasari dengan tingkat kepatuhan seseorang dari organisasi dan struktur organisasi ditentukan oleh filosofi dari manajer organisasi tersebut. Keadaan organisasi dan struktur organisasi dapat memotivasi perawat untuk berpartisipasi pada tingkatan yang konsisten sesuai dengan tujuan. Hal ini sesuai dengan Ivancevich (2013), berpendapat bahwa karakteristik organisasi meliputi

komitmen organisasi dan hubungan kerja antara pekerja dengan supervisor yang akan mempengaruhi kepuasan terhadap individu.

Selain itu menurut Baron dkk, sebagaimana dikutip Sarlito W. Sarwono 2018 menjelaskan bahwa kepatuhan (obedience) merupakan salah satu jenis dari pengaruh sosial, yaitu ketika seseorang menaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu karena adanya unsur power. Power ini diartikan sebagai suatu kekuatan atau kekuasaan yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau lingkungan tertentu

Oleh karena itu, pentingnya pimpinan organisasi memberi contoh terhadap bawahannya dalam melakukan tindakan sesuai SOP dengan tujuan menurut Arnani, P (2016) secara spesifik tujuan dari SOP adalah: 1. Agar pegawai dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja. 2. Memudahkan proses pengontrolan pada setiap prosedur kerja. 3. Mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi.

5. Hubungan Pengetahuan Dengan Kepatuhan Bidan Terhadap SOP Pertolongan Persalinan

Dilihat karakteristik pengetahuan bidan adalah mayoritas baik berjumlah 40 orang (40%) dan terdapatnya hubungan dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan. Pengetahuan bidan mayoritas baik di karenakan bidan banyak yang sudah mendapatkan pelatihan APN. Menurut Nototmodjo, 2018 yang menyatakan pengetahuan merupakan hasil dari tahu, yang terjadi karena proses penginderaan yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya menurut Wahyu Dewi Hapsari, et al (2014). yang menyatakan terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan kepatuhan Bidan praktik mandiri. Hal tersebut membuktikan teori bahwa pengetahuan merupakan domain penting dan faktor awal seseorang untuk berperilaku patuh.

Menurut asumsi peneliti terdapatnya pengetahuan dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan dengan adanya pengetahuan SOP bagi bidan yang baru akan menjadi suatu pedoman untuk menghindari terjadinya angka kematian pada ibu dan bayi saat pertolongan persalinan. Pada penelitian ini terlihat jumlah bidan yang mengikuti pelatihan APN lebih banyak dibanding tidak mengikuti pelatihan APN, selain itu dilihat dari tingkat

kepatuhan bidan pada penelitian ini bidan termasuk patuh sesuai SOP pertolongan persalinan di bandingkan dengan bidan yang tidak patuh. Pengetahuan dapat di lakukan dengan mengikuti pelatihan APN, hal ini sesuai P2KS, 2015 yang menyatakan secara umum tujuan APN adalah menjaga kelangsungan hidup dan memberikan derajat kesehatan yang tinggi bagi Ibu dan bayinya melalui upaya yang terintegrasi dan lengkap tetapi dengan intervensi yang seminimal mungkin agar prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang diinginkan atau optimal. Pelatihan APN disusun bagi tenaga kesehatan yang bekerja secara mandiri dan menerapkan pelayanan terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan untuk memperoleh manfaat maksimal dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu dan bayi baru lahir. Pengetahuan berdasarkan pengalaman yang tidak baik juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan tindakan SOP pertolongan persalinan. Hal ini sesuai dengan teori Notoatmodjo, 2018 yang menyatakan Pengalaman merupakan peristiwa yang tertangkap oleh panca indera dan tersimpan dalam memori. Pengalaman dapat diperoleh ataupun dirasakan saat peristiwa baru saja terjadi maupun sudah lama berlangsung. Pengalaman yang terjadi dapat diberikan kepada siapa saja untuk digunakan dan menjadi pedoman serta pembelajaran manusia.

6. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah pada saat pengambilan data adanya kesulitan saat menemui bidan PONE D yang mewakili yang bertanggung jawab di ruang PONE D, maka dari itu solusi peneliti agar dapat jawaban melalui kuesioner dengan cara penggunaan aplikasi google form yang tersimpan di google drive di sebarakan melalui WhatsApp pada seluruh bidan yang bertanggung jawab di ruang PONE D di seluruh Puskesmas di Kabupaten Karawang.

Menurut peneliti ketebatasannya saat tidak langsung bertemu dengan responden secara langsung dan komunikasi melalui aplikasi whatsapp sehingga dokumentasi hanya di buktikan dengan jawaban yang tersimpan di google drive.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tantang Hubungan Antara Status Akreditasi Dengan Kepatuhan Bidan

Terhadap SOP Pertolongan Persalinan Di Puskesmas Mampu Poned Wilayah Kabupaten Karawang didapatkan:

1. Karakteristik kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan mayoritas bidan patuh berjumlah 84 orang (84%)
2. Karakteristik status akreditasi puskesmas mampu PONE D Kabupaten Karawang mayoritas akreditasi madya berjumlah 63 orang (63%)
3. Karakteristik tingkat pendidikan bidan mayoritas pendidikan rendah (D3 Kebidanan) berjumlah 70 orang (70%)
4. Karakteristik lama kerja bidan mayoritas > 5 tahun berjumlah 90 orang (90%)
5. Karakteristik riwayat pelatihan APN mayoritas bidan pernah mengikuti pelatihan APN berjumlah 59 orang (59%)
6. Karakteristik pengetahuan bidan mayoritas pengetahuan bidan baik berjumlah 40 orang (40%)
7. Tidak terdapat hubungan antara status akreditasi, lama kerja, tingkat pendidikan dan lama kerja dengan kepatuhan bidan terhadap SOP Pertolongan Persalinan Di Puskesmas Mampu Poned Wilayah Kabupaten Karawang
8. Terdapat hubungan pengetahuan dengan kepatuhan bidan terhadap SOP Pertolongan Persalinan Di Puskesmas Mampu Poned Wilayah Kabupaten Karawang

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Susanti, Ani Laila, I. daiya. (2015). *Buku ajar kebidanan persalinan*. EGC.
- Asrinah. (2013). *Konsep Kebidanan*. Graha ilmu.
- Azwar Saifuddin. (2015). *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Liberty.
- Carpenito, L. J. (2013). *Buku saku diagnosis keperawatan* (13th ed.). EGC.
- Dinas Kesehatan Kab. Karawang. (2018). Profil Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2018. *Www.KarawangKab.Go.Id*, 1–339.
- Ivancevich, G. (2013). *Organisasi*. Binarupa Aksara.
- Juliana. (2017). FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN BIDAN MELAKSANAKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ASUHAN PERSALINAN NORMAL (APN) DI KLINIK BERSALIN

- KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017.
Wahana Inovasi.
- Kurnia Dwi Rimandini. (2014). *Asuhan Kebidanan Persalinan (Intra natal Care)*. CV TRANS INFO MEDIA.
- Nurjasmi, E. (2016). *Buku Acuan Midwifery Update*. PP Ikatan Bidan Indonesia.
- Nurul Jannah. (2016). *Konsep Dokumentasi Kebidanan* (cetakan 3). Ar Ruzz Media.
- Prof.Dr Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kwalitatif*. CV AlfaBeta.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kebidanan. *Republik Indonesia*, 011594, 50.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122742/uu-no-17-tahun-2019>
- Sari, R. N. (2017). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan bidan dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) dalam melakukan APN di rumah sakit umum madani medan 2016. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Soekidjo Notoatmodjo. (2018). *Metodologi penelitian kesehatan*. PT Rineka Cipta.